

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 41 TAHUN 2007 MATA
PELAJARAN IPS KELAS VI**

ARTIKEL PENELITIAN

OLEH

**DESI PARDILA
NIM. F37008027**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2013**

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 41 TAHUN 2007 MATA PELAJARAN IPS KELAS VI

Desi Pardila, Marzuki dan Suhardi Marli
PGSD FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak
e-mail: desi.pardila.pgsd@gmail.com

Abstrak: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Mata Pelajaran IPS Kelas VI. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang objektif tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 mata pelajaran IPS Kelas VI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72,47 % guru telah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 80,94 % guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 tahun 2007, penilaian yang dilakukan oleh guru belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan standar penilaian oleh pendidik yang telah ditetapkan oleh BSNP, pengawasan proses pembelajaran IPS telah dilaksanakan dengan terencana dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007

Abstract: Implementation Regulation of the Minister of National Education No. 41 of 2007 Class VI Social Science Subjects. The purpose of this research to gain an overview on the implementation of Regulation of the Minister of National Education No. 41 of 2007 Social studies class VI. This research used descriptive method. The result showed that 72.47% of teachers have developed lesson plan and 80.94% of teachers had been implemented learning in accordance with Regulation 41 of the Minister of National Education of 2007, the assessment that had been done by the teacher implemented fully suitable with the standards of assessment by teachers established by the National Education Standards, monitoring the learning process of social studies have been carried out in a planned and sustainable.

Keywords : Implementation, Regulation of the Minister of National Education No. 41 of 2007

Pendidikan memiliki kekuatan yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki seseorang secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) PP No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup dari Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Dalam standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus.

Penilaian hasil belajar peserta didik, baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dari observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 6 dan 9 Agustus 2012 di SDN 09 Pontianak Tenggara, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial belum menerapkan standar proses sesuai Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 41 tahun 2007. Hal itu terlihat dalam perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajarannya terdapat kesenjangan antara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan sosial yang telah dibuat dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 41 tahun 2007, yaitu diantaranya identitas mata pelajaran belum lengkap, kegiatan pembelajarannya belum mencantumkan proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pembelajaran yang dilaksanakan masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Sehingga belum bisa menggambarkan tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti saat ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mata pelajaran IPS Kelas VI?”

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 tahun 2007 berbunyi: Pasal 1, (1) Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran, (2) Standar proses yang dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. Pasal 2, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jadi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 tahun 2007 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Merencanakan proses pembelajaran merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang direncanakan secara baik tentunya akan mendapatkan hasil yang baik pula. Menurut John Jarolimek dan Clifford D. Foster (1976: 117), *“The elementary-school teacher must be a good planner in order to succeed. the demands of teaching in an elementary classroom are extremely diverse, and the teacher who is poor planner usually finds the task overwhelming. Teacher who*

are recognized as "having good classroom control" usually are those who see the relationship of instruction and classroom management and who plan accordingly. In the final analysis, good teaching result from good planing; thus the prospective teacher should become thoroughly familiar with the why? what? and how ? of planning”.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 dijelaskan bahwa, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 yaitu (1) Rombongan belajar, jumlah maksimal peserta didik untuk Sekolah Dasar berjumlah 28 peserta didik, (2) Beban kerja minimal guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, (3) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah. Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1:1 per mata pelajaran, (4) Pengelolaan kelas, dalam pengelolaan kelas guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Nana Sudjana (2010:3) mengatakan, penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Di dalam BSNP, dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 tahun 2007 dijelaskan bahwa, “Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Kelompok Mata Pelajaran”.

BSNP dalam pedoman umum penilaian mengemukakan adanya standar penilaian oleh pendidik dan standar penilaian oleh satuan pendidikan. Standar penilaian oleh pendidik merupakan standar yang mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan penilaian, standar pengolahan dan penyajian hasil penilaian serta tindak lanjutnya.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 pengawasan proses pembelajaran meliputi beberapa hal yaitu (1) Pemantauan, (2) Supervisi, (3) Evaluasi, (4) Pelaporan, (5) Tindak lanjut.

Nursyid Sumaatmadja (2007:1.9) mengatakan bahwa, “Ilmu Pengetahuan Sosial tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari

kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora”. Sedangkan dalam BSNP (2006:575) bahwa, “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, antropologi, tata Negara, sosiologi, dan ekonomi. Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat”.

Nursid Sumaatmadja, dkk (2007:1.12) mengatakan, “Pada hakikatnya IPS tidak dapat terlepas dari masyarakat”. Sedangkan Silvester Petrus Taneo, dkk (2009:1-19), megemukakan bahwa, “Hakikat IPS adalah sebagai pengetahuan yang akan membina para generasi muda belajar ke arah positif yakni mengadakan perubahan-perubahan sesuai kondisi yang diinginkan oleh dunia modern atau sesuai daya kreasi pembangun serta prinsip-prinsip dasar dan sistem nilai yang dianut masyarakat serta membina kehidupan masa depan masyarakat secara cemerlang dan lebih baik untuk kelakdiwariskan kepada turunannya secara lebih baik”.

Ruang lingkup mata pelajaran IPS yang tercantum dalam KTSP (2006:575) meliputi aspek-aspek yaitu (1) Manusia, tempat, dan lingkungan, (2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan, (3) Sistem sosial dan budaya, (4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Sardjiyo, dkk (2007: 1.28) tujuan pendidikan IPS di SD adalah sebagai berikut: (1) Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat, (2) Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat, (3) Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian, (4) Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut, (5) Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 mata pelajaran IPS Kelas VI. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh: (1) Gambaran nyata tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS kelas VI, (2) Gambaran nyata tentang proses pelaksanaan pembelajaran IPS kelas VI, (3) Gambaran nyata tentang penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran IPS kelas VI, (4) Gambaran nyata tentang pengawasan proses pembelajaran IPS kelas VI.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2007:67), “Metode deskriptif adalah prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Bentuk penelitian ini adalah survey, yaitu peneliti langsung meneliti dan mengamati implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 pada mata pelajaran IPS kelas VI.

Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VI, kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan. Dengan keseluruhan guru berjumlah 9 orang, kepala sekolah berjumlah 9 orang dan 1 orang pengawas satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

Dalam penelitian ini teknik yang dianggap tepat untuk pengumpulan data, yaitu: (1) Teknik observasi langsung, (2) Teknik komunikasi langsung, (3) Teknik studi dokumenter.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah (1) Lembar observasi, (2) Panduan wawancara, (3) Dokumen-dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode non statistik, yaitu analisis data deskriptif. Dari data yang diperoleh melalui penelitian ini dilaporkan apa adanya dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada.

Untuk menjawab sub masalah 1, berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut dinilai menggunakan IPKG 1. Dari IPKG 1 tersebut ditarik nilai rata-rata yang kemudian dideskriptifkan. Kemudian nilai rata-rata tersebut dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus persentase dari Muhammad Ali (2005: 177) yaitu
$$\text{Persentase} = \frac{\sum X}{N} \times 100\%.$$

Untuk menjawab sub masalah 2, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari IPKG 2 yang kemudian dihitung nilai rata-rata yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dideskriptifkan. Kemudian nilai rata-rata tersebut dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus persentase.

Untuk menjawab sub masalah 3 digunakan data hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang ditarik suatu kesimpulan untuk dideskriptifkan.

Untuk menjawab sub masalah 4 peneliti menggunakan data hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan yang kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk dideskriptifkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penilaian kinerja guru dalam menyusun RPP, bahwa kemampuan guru-guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran masih beragam. Terdapat satu orang guru termasuk dalam kategori kurang, dua orang dengan kategori cukup, dan lima orang dengan kategori baik.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, bahwa kemampuan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak sama. Terdapat dua orang guru termasuk dalam kategori cukup, dan enam orang termasuk dalam kategori baik.

RPP yang telah disusun termasuk ke dalam kategori baik. Namun, di dalam tiap-tiap komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran masih terdapat beberapa yang termasuk ke dalam kategori kurang. Dalam komponen indikator pencapaian kompetensi terdapat tiga orang guru yang tidak mencantumkan indikator pencapaian kompetensi pada RPP. Padahal indikator pencapaian kompetensi merupakan salah satu hal pokok yang harus dicantumkan dalam RPP.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran tentunya guru harus menyusun prosedur dan instrument penilaian proses dan hasil belajar. Masih terdapat beberapa RPP yang prosedur dan instrument penilaian belum jelas. Teknik penilaian yang dibuat seharusnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, masih banyak RPP yang instrument penilaiannya tidak dicantumkan secara lengkap. Instrument penilaian itu seperti soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran.

Dari hasil perhitungan persentase tentang RPP mata pelajaran IPS kelas VI Sekolah Dasar Negeri Se-kecamatan Pontianak Tenggara diketahui bahwa sebesar 72,47 % guru telah menyusun RPP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 Tahun 2007.

Guru telah melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan baik. Dalam kegiatan pendahuluan guru telah menyiapkan peserta didik baik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan telah diajukan untuk mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan pendahuluan guru telah menyampaikan informasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai, cakupan materi yang akan dipelajari dan kegiatan pembelajaran apa yang akan dilakukan. Pada kegiatan pendahuluan hanya satu orang guru pelaksanaannya termasuk dalam kategori cukup, sedangkan yang lainnya termasuk dalam kategori baik.

Kegiatan yang dilakukan setelah pendahuluan yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif. Namun dalam pelaksanaan kegiatan inti hanya dua orang guru yang telah melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih didominasi oleh guru dan belum tercipta interaksi antar siswa. Masih ada beberapa guru yang tidak menggunakan media pembelajaran saat melaksanakan kegiatan inti.

Setelah melaksanakan kegiatan inti, kegiatan terakhir yang dilakukan dalam pembelajaran adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup dilaksanakan dengan membuat rangkuman materi pelajaran dan memberikan tugas terstruktur pada peserta didik. Guru telah melakukan refleksi dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Rencana tindak lanjut dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya telah disampaikan secara baik oleh guru.

Dari hasil perhitungan persentase tentang pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS kelas VI Sekolah Dasar Negeri Se-kecamatan Pontianak, diketahui bahwa sebesar 80,94 % guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 Tahun 2007.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa secara umum penilaian yang dilakukan oleh guru pelaksanaannya sesuai dengan standar penilaian oleh pendidik yang telah ditetapkan oleh BSNP mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan penilaian, standar pengolahan dan penyajian hasil penilaian serta tindak lanjutnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sedikit kekurangan, yaitu dalam perencanaan penilaian guru belum mencantumkan prosedur penilaian secara lengkap. Dan bentuk tindak lanjut untuk peserta didik yang memiliki keunggulan belum pernah diberikan layanan pengayaan.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah diperoleh informasi bahwa pengawasan proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan proses pembelajaran diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan. Kepala sekolah bekerja sama dengan pengawas untuk selalu memonitoring kinerja para guru baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Guru-guru selalu diberikan pembinaan dan tindak lanjut agar dapat terus meningkatkan kinerja mereka dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan data data hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan umum yang didapat yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 tahun 2007 telah dilaksanakan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VI Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Pontianak Tenggara.

Secara khusus dapat disimpulkan bahwa: (1) Sebesar 72,47 % guru telah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 Tahun 2007, (2) Sebesar 80,94 % pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 Tahun 2007, dimana kegiatan belajar mengajar telah berbasis pada siswa, kontekstual, demokratis dan Pembelajaran Aktif Inovatif dan Menyenangkan (PAIKEM) , (3) Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sesuai dengan standar penilaian oleh pendidik yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan, (4) Pelaksanaan pengawasan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 tahun 2007 melalui lima tahap yaitu : (a) pemantauan, (b) supervisi, (c) evaluasi, (d) pelaporan, dan (e) tindak lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Standar Nasional Pendidikan.(2006). **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Depdiknas. (2007). **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses**

- Hadari Nawawi. (2007). **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jarolimek, John & Clifford D. Foster. (1976). **Teaching and Learning in the Elementary School**. London: Collier Macmillan Publishers
- Muhammad Ali. (2005). **Metode Kependidikan, Prosedur, dan Strategi**. Bandung: Angkasa
- Nana Sudjana.(2010). **Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar**. Remaja Rosdakarya.
- Nursyid Sumaatmadja. (2007). **Konsep Dasar IPS**. Jakarta: Universitas
- Sardjiyo, dkk. (2007). **Pendidikan IPS di SD**. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Silvester Petrus Taneo, dkk. (2009). **Kajian IPS SD Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.